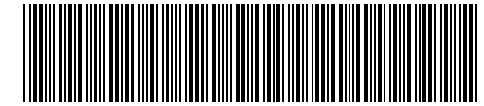




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 089.01.2.450670/2022**



DS:4203-8750-9176-6828

**Revisi ke 07**

Tanggal : 13 Juli 2022

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
2. Unit Organisasi : (01) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode>Nama Satker : (450670) PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU
- Sebesar : Rp. 26.629.083.000 ( DUA PULUH ENAM MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	26.629.083.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 26.629.083.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NOMOR : DIPA- 089.01.2.450670/2022**



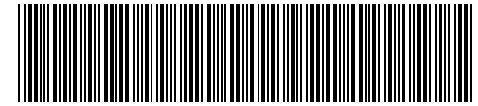
DS:4203-8750-9176-6828

Satker : (450670) PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

---

CH	Program Pengawasan Pembangunan	Rp.	2.574.056.000
CH.3701	Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan	Rp.	2.574.056.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	24.055.027.000
WA.3676	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Rp.	24.055.027.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 089.01.2.450670/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4203-8750-9176-6828

Kementerian Negara/Lembaga : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Provinsi : (09) RIAU  
Kode>Nama Satker : (450670) PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

Halaman : I A. 1

Program	: 089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan	2.574.056.000
Kegiatan	: 3701	Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan	2.574.056.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah BUMN dengan MRI lebih dari sama dengan Level 3	
	: 2. 01	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	
	: 3. 01	Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	
	: 4. 01	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	
	: 5. 01	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	
	: 6. 01	Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP Lebih dari Sama Dengan Level 3	
	: 7. 01	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	
	: 8. 01	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	
	: 9. 02	Jumlah BUMD dengan MRI lebih dari sama dengan Level 3	
	: 10. 02	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	
	: 11. 02	Jumlah KP yang diawasi	
	: 12. 02	Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	
	: 13. 02	Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP Lebih dari Sama dengan Level 3	
	: 14. 02	Persentase hasil pengawasan preventif/edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	
	: 15. 02	Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	
	: 16. 03	Jumlah BLUD dengan MRI lebih dari sama dengan Level 3	
	: 17. 03	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	
	: 18. 03	Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	
	: 19. 03	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	
	: 20. 03	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	
	: 21. 03	Persentase Pemda Provinsi dengan MRI Lebih dari Sama Dengan Level 3	
	: 22. 04	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 089.01.2.450670/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4203-8750-9176-6828

Kementerian Negara/Lembaga : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Provinsi : (09) RIAU  
Kode>Nama Satker : (450670) PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

Halaman : I A. 2

Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan

- 23. 04 Jumlah BU dengan efektivitas pengendalian korupsi baik
- 24. 04 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern lebih dari sama dengan Level 3
- 25. 04 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target
- 26. 04 Nilai penyelamatan keuangan negara/daerah
- 27. 04 Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI Lebih dari Sama Dengan Level 3
- 28. 05 Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern lebih dari sama dengan Level 3
- 29. 05 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan
- 30. 05 Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer
- 31. 05 Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
- 32. 06 Nilai penyelamatan pembiayaan daerah
- 33. 06 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief ) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
- 34. 07 Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- 35. 08 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai
- 36. 09 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

Klasifikasi Rincian Output	1	:	3701.FAG	Pengawasan Pembangunan	13,00	Laporan	509.926.000	
Rincian Output		:	01	FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	2,00	Laporan	54.475.000
		:	02	FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	1,00	Laporan	31.197.000
		:	03	FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1,00	Laporan	87.824.000
		:	04	FAG.U02	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	7,00	Laporan	245.361.000
		:	05	FAG.U06	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	1,00	Laporan	60.513.000
		:	06	FAG.U07	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	1,00	Laporan	30.556.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 089.01.2.450670/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4203-8750-9176-6828

Kementerian Negara/Lembaga : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Provinsi : (09) RIAU  
Kode>Nama Satker : (450670) PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	2	:	3701.UAG	Pengawasan Pembangunan		21,00	Laporan	2.064.130.000		
Rincian Output	:		01	UAG.U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	(PN)	18,00	Laporan	1.660.930.000	
			02	UAG.U09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	(PN)	2,00	Laporan	333.200.000	
			03	UAG.U10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	(PN)	1,00	Laporan	70.000.000	
Program	:		089.01.WA	Program Dukungan Manajemen				24.055.027.000		
Kegiatan	:		3676	Pelaksanaan Dukungan Manajemen				24.055.027.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:		1. 01	Rata Skor ZI Unit Kerja						
			2. 02	Jumlah Unit Kerja yang Penyusunan RKA Tepat Waktu						
			3. 03	Jumlah unit kerja dengan Nilai IKPA baik						
			4. 04	Jumlah unit kerja dengan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP						
			5. 05	Jumlah unit kerja dengan Pengelolaan BMN Baik						
			6. 06	Jumlah unit kerja dengan kategori SAKIP minimal BB						
			7. 07	Rata-rata Indeks Reputasi Unit Kerja						
			8. 08	Jumlah unit kerja dengan Maturitas SPIP minimal level 3						
			9. 09	Jumlah unit kerja dengan Indeks MR minimal level 3						
			10. 10	Rata-rata Indeks Kualitas Layanan Unit Kerja (Internal)						
			11. 11	Rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan BPKP (Stakeholders)						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				2,00	Layanan	24.055.027.000
Rincian Output	:		01	EBA.962	Layanan Umum		1,00	Layanan	500.170.000	
			02	EBA.994	Layanan Perkantoran		1,00	Layanan	23.554.857.000	

Jakarta, 17 November 2021  
SEKRETARIS UTAMA

ttd.  
ERNADHI SUDARMANTO  
NIP 196507040985031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : DIPA- 089.01.2.450670/2022**

**I B. SUMBER DANA**



DS:4203-8750-9176-6828

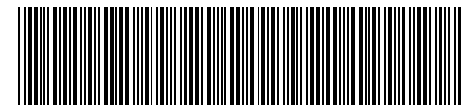
Kementerian Negara/Lembaga : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)  
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
 Provinsi : (09) RIAU  
 Kode>Nama Satker : (450670) PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	26.629.083.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	26.629.083.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 089.01.2.450670/2022  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4203-8750-9176-6828

Kementerian Negara/Lembaga : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Provinsi : (09) RIAU  
Kode>Nama Satker : (450670) PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>450670</b>	<b>PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU</b>	<b>20.504.967</b>	<b>6.124.116</b>	-	-	-	<b>26.629.083</b>		
<b>089.01.CH</b>	<b>Program Pengawasan Pembangunan</b>	-	<b>2.574.056</b>	-	-	-	<b>2.574.056</b>		
<b>3701</b>	<b>Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan</b>	-	<b>2.574.056</b>	-	-	-	<b>2.574.056</b>		
3701.FAG	Pengawasan Pembangunan (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	509.926	-	-	-	509.926	09 . 51	
01	RM	-	509.926	-	-	-	509.926	008@	
3701.UAG	Pengawasan Pembangunan (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	2.064.130	-	-	-	2.064.130	09 . 51	
01	RM	-	2.064.130	-	-	-	2.064.130	008@	
<b>089.01.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>20.504.967</b>	<b>3.550.060</b>	-	-	-	<b>24.055.027</b>		
<b>3676</b>	<b>Pelaksanaan Dukungan Manajemen</b>	<b>20.504.967</b>	<b>3.550.060</b>	-	-	-	<b>24.055.027</b>		
3676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	20.504.967	3.550.060	-	-	-	24.055.027	09 . 51	
01	RM	20.504.967	3.550.060	-	-	-	24.055.027	008	
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.504.967</b>	<b>6.124.116</b>	-	-	-	<b>26.629.083</b>		

Jakarta, 17 November 2021  
SEKRETARIS UTAMA

ttd.  
ERNADHI SUDARMANTO  
NIP 196507040985031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 089.01.2.450670/2022  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4203-8750-9176-6828

Kementerian Negara/Lembaga : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)  
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Provinsi : (09) RIAU  
Kode>Nama Satker : (450670) PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	450670	<b>PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	1.413.159	1.673.426	1.889.457	3.114.070	1.818.160	2.095.819	2.933.822	2.043.114	2.007.777	2.072.808	2.205.006	3.362.465	26.629.083
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.381.552	1.344.605	1.395.863	2.537.736	1.469.586	1.479.116	2.464.969	1.440.107	1.444.925	1.507.174	1.507.174	2.532.160	20.504.967
		<b>BELANJA BARANG</b>	31.607	328.821	493.594	576.334	348.574	616.703	468.853	603.007	562.852	565.634	697.832	830.305	6.124.116
	089.01.CH.3701	Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan	0	47.440	245.893	199.616	133.293	356.379	200.263	250.007	292.852	203.121	300.229	344.963	2.574.056
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	47.440	245.893	199.616	133.293	356.379	200.263	250.007	292.852	203.121	300.229	344.963	2.574.056
	089.01.WA.3676	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	1.413.159	1.625.986	1.643.564	2.914.454	1.684.867	1.739.440	2.733.559	1.793.107	1.714.925	1.869.687	1.904.777	3.017.502	24.055.027
		51 BELANJA PEGAWAI	1.381.552	1.344.605	1.395.863	2.537.736	1.469.586	1.479.116	2.464.969	1.440.107	1.444.925	1.507.174	1.507.174	2.532.160	20.504.967
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	31.607	281.381	247.701	376.718	215.281	260.324	268.590	353.000	270.000	362.513	397.603	485.342	3.550.060
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	45.564
		- PNBPN (425131)	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	45.564

Jakarta, 17 November 2021  
SEKRETARIS UTAMA

ttd.  
ERNADHI SUDARMANTO  
NIP 196507040985031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 089.01.2.450670/2022  
IV A. B L O K I R**



DS:4203-8750-9176-6828

Kementerian Negara/Lembaga : [089] BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)  
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Provinsi : [09] RIAU  
Kode dan Nama Satker : [450670] PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

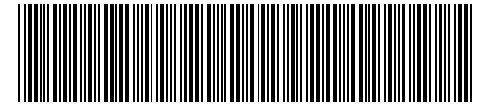
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>450670</b>	<b>PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.550 Automatic Adjustment
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 640.314		
	52 Belanja Barang Rp. 640.314		
<b>089.01.CH 3701</b>	<b>Program Pengawasan Pembangunan Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan</b>		Disposisi: Automatic Adjustment 524115 Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19(RM)
<b>3701.FAG</b>	<b>Pengawasan Pembangunan</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.000 Automatic Adjustment
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 53.689 Automatic Adjustment Disposisi: Automatic Adjustment		Disposisi: Automatic Adjustment
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.050 Automatic Adjustment Disposisi: Automatic Adjustment		
	524115 Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.000 Automatic Adjustment Disposisi: Automatic Adjustment		
<b>3701.UAG</b>	<b>Pengawasan Pembangunan</b>		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.307 Automatic Adjustment Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 500.718 Automatic Adjustment Disposisi: Automatic Adjustment		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		

Jakarta, 17 November 2021  
SEKRETARIS UTAMA

ttd.  
ERNADHI SUDARMANTO  
NIP 196507040985031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 089.01.2.450670/2022  
IV B. C A T A T A N**



DS:4203-8750-9176-6828

Kementerian Negara/Lembaga : [089] BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)  
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Provinsi : [09] RIAU  
Kode dan Nama Satker : [450670] PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021  
SEKRETARIS UTAMA

ttd.  
ERNADHI SUDARMANTO  
NIP 196507040985031001